

KAJIAN PEMANFAATAN APBD UNTUK SEKTOR PENDIDIKAN DI PROVINSI ACEH

Putra Riyansah
raiy4n@yahoo.com

Sujali
sujali49@yahoo.com

Abstract

This research titled “ utilizing of fund of APBD to education sector in Aceh Province” is a quantitative research to find out financing education dynamic during the year 2007 till 2011, and utilizing of the budget in Aceh Province. The result of this research shows during the year 2007 -2011, APBD allocated to education sector experiencing fluctuations in the amount of the APBD either the percentage. North Aceh regency allocated the most of APBD to education sector meanwhile Pidie Regency allocated the least amount of it’s budget of APBD to education sector. The utilizing of education funding is focused at nine years old education. Aceh Utara received the largest operational school donation (BOS) fund among the regency/ city, and Sabang City received the fewest. The quantities of BOS that received by regency/ city correlated with the number and level of school and also the number of poor people.

Keyword : development, allocation, education

Abstrak

Penelitian yang berjudul : Kajian Pemanfaatan APBD untuk Sektor Pendidikan di Provinsi Aceh ini” merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika dan pengalokasian pembiayaan sektor pendidikan di Provinsi Aceh dalam kurun waktu tahun 2007 hingga 2011.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2007-2011 jumlah APBD yang dialokasikan untuk sektor pendidikan mengalami fluktuasi baik secara nilai maupun dari besaran prosentase dari total APBD. Kabupaten Aceh Utara merupakan kabupaten yang paling banyak mengalokasikan APBD-nya untuk sektor pendidikan, sedangkan Kabupaten Pidie adalah kabupaten yang mengalokasi APBD untuk sektor pendidikan paling sedikit. Pemanfaatan pembiayaan pendidikan terfokus pada pendidikan 9 tahun. Kabupaten Aceh Utara menerima BOS terbesar sedangkan penerima BOS terkecil adalah Kota Sabang. Besaran BOS yang diterima kabupaten/kota ini berhubungan dengan jumlah murid menurut jenjang pendidikan dan jumlah sekolah, serta berhubungan dengan tingkat kesejahteraan.

Kata Kunci: pembangunan, alokasi, pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kerangka dasar bagi pembangunan nasional, karena dengan pendidikan yang bermutu dapat diciptakan sumberdaya manusia yang bermutu pula. Sumber daya manusia ini merupakan aktor utama penggerak pembangunan nasional. Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu pilar penting bagi pembangunan wilayah.

Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah membawa implikasi yang luas dalam sistem pemerintahan. Dimana dalam undang-undang tersebut disebutkan secara eksplisit bahwa sektor pendidikan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan daerah kabupaten dan kota. Dapat diartikan bahwa bahwa kemajuan pendidikan nasional dimasa mendatang sangat tergantung dari perhatian pemerintah kabupaten/ kota terhadap sektor pendidikan di daerah masing-masing.

Undang-undang NO 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, mengenai pembiayaan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam pasal 49 ayat 1 (1) telah menetapkan besaran ideal yang diperlukan untuk alokasi pembangunan pendidikan yaitu 20 % dari total APBD diluar gaji tenaga pendidik/ guru dan biaya pendidikan kedinasan. Namun, banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan di daerah, selain besarnya dana yang dianggarkan untuk sektor pendidikan salah satu aspek yang sangat penting adalah SDM baik berupa tenaga pendidik, pengelola maupun pihak *stakeholders/* swasta, serta para pimpinan sekolah dan para ketua yayasan.

Provinsi Aceh merupakan provinsi yang mendapatkan status otonomi khusus di Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pemberlakuan otonomi khusus itu diwujudkan dalam pelaksanaan syariat islam di Aceh. Walaupun berstatus otonomi pembangunan di Provinsi Aceh khususnya pendidikan di Provinsi Aceh masih belum baik. Masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan yang tinggi antara kabupaten/ kota di sisi lain. Konflik berkepanjangan dan bencana alam dahsyat dimasa lalu telah berperan bagi tingginya angka putus sekolah di Provinsi Aceh. Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang diambil yakni untuk mengetahui bagaimana dinamika pembiayaan dana APBD sektor pendidikan di Provinsi Aceh, dan bagaimana hubungan besaran bantuan pendidikan dengan faktor-faktor regional di wilayah kabupaten/ kota.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk:(1) mengetahui alokasi pembiayaan dana APBD untuk sektor pendidikan Propinsi Aceh pada kurun waktu tahun 2007-2011, (2) mengetahui besaran pemanfaatan pembiayaan sub-sektor pendidikan dari dana APBD di Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, (3) mengetahui hubungan antara jumlah sekolah dan jumlah murid serta jumlah penduduk miskin dengan besaran bantuan operasional sekolah ke tingkat sekolah.

TINJAUAN PUSTAKA

Rubenstein (2003) mengungkapkan bahwa kualitas pendidikan di suatu daerah dapat di ukur berdasarkan 2 faktor yaitu:

1. Banyaknya jumlah sekolah, dengan asumsi bahwa walaupun sekolah tersebut miskin tetapi selama murid masih tertarik untuk bersekolah maka hal tersebut mengindikasikan bahwa minat murid untuk belajar sesuatu.
2. *Literacy rate*, atau jumlah penduduk yang dapat baca tulis dari total seluruh jumlah penduduk yang ada. Di negara-negara maju *Literacy rate* mencapai hingga 95 %.

Ketersediaan fasilitas pelayanan baik fisik maupun non fisik sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan di suatu daerah, dalam bidang fisik seperti ketersediaan sarana standart dalam pembangunan gedung pendidikan maupun sarana laboratorium, juga bidang non fisik seperti besar adanya bantuan biaya pendidikan.

Muta'ali, Lutfi (2000) menjelaskan tentang metode pengklasifikasian ketersediaan fasilitas pelayanan, yaitu sebagai berikut:

1. Ketersediaan pelayanan (*Avaibility Service*) yaitu dengan mengukur ada atau tidaknya fasilitas pelayanan. Apabila fasilitas pelayanan tersedia diberi nilai 1 (satu) dan jika fasilitas pelayanan tidak tersedia maka diberi nilai 0 (nol).
2. Tingkat ketersediaan (*Size of Avaibility*) yaitu dengan mengukur jumlah unit suatu fasilitas pelayanan yang tersedia. Metode yang sering digunakan adalah dengan Skalogram. Dengan Skalogram dapat dikelompokkan kecamatan-kecamatan (membuat hirarki) berdasarkan total bobot fasilitas pelayanan yang dimiliki masing-masing kecamatan.
3. Fungsi pelayanan atau daya layan (*Fungsi of availability*), dengan cara membandingkan antara

ketersediaan fasilitas pelayanan dan variabel pembangunan misalnya besarnya pengguna actual, penggunaan potensial, pendudukan keseluruhan dan dengan pembanding standar. Pengguna potensial adalah jumlah penduduk di Kabupaten/ Kota yang termasuk dalam kelompok usia sekolah pada tingkat sekolah tertentu. Pengguna actual merupakan jumlah yang termasuk aktif dalam pemanfaatan fasilitas pendidikan. Evaluasi daya layan fasilitas pendidikan pada penelitian ini akan menggunakan perbandingan ketersediaan fasilitas dengan pengguna actual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan memberikan gambaran wilayah penelitian sesuai dengan kondisi daerah sesuai dengan unit analisisnya. Adapun penggambaran yang dimaksud adalah variasi kondisi pendidikan di kabupaten/kota di Propinsi Aceh berdasarkan faktor-faktor regional yang ada di wilayah tersebut. Adapun data yang digunakan adalah data Provinsi Aceh dalam angka dari tahun 2007-2011 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, data keuangan Provinsi Aceh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Provinsi Aceh (DPKKA) serta data dari Dinas Pendidikan Provinsi Aceh.

Analisis Data

Proses pengolahan data diawali dengan kegiatan rekapitulasi data sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi terkait. Kemudian dilakukan reduksi data dan pengkategorian data. Uji validitas dan reliabilitas data dilakukan pada data

numeric. Hasil proses pengolahan data ini akan disajikan dalam bentuk table.

Analisis data-data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan software Microsoft Excel, yang dengan melakukan perhitungan-perhitungan sederhana, misalnya perhitungan persentase dan rasio

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pendidikan di Provinsi Aceh

Analisis digunakan di gunakan untuk mengetahui bagaimana kondisi pendidikan di Provinsi Aceh. Kondisi yang dimaksud yaitu keadaan faktual mengenai jumlah dan ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan, fungsi pelayanan atau daya layan fasilitas pendidikan (*function of availability*) serta angka melek huruf (*literacy rate*). Sementara itu untuk mengetahui hirarki tingkat ketersediaan pelayanan digunakan metode skalogram. Analisis ini digunakan untuk mengetahui daerah-daerah dengan tingkat ketersediaan fasilitas pendidikan tinggi (hirarki I), sedang (hirarki II) dan rendah (hirarki III).

Untuk mengetahui hirarki tingkat ketersediaan fasilitas pendidikan, terlebih dilakukan pembobotan terhadap data ketersediaan sekolah. Ketersediaan sekolah dasar (SD) diberi bobot 1; SMP diberi bobot 2 dan SMA diberi bobot 3.

Dari hasil analisis dapat diketahui jika terdapat 4 kabupaten dan 1 kota yang termasuk dalam hirarki I, yaitu kabupaten Aceh Timur, Aceh Besar, Pidie dan Kabupaten Aceh Utara sedangkan kota yang tergolong dalam hirarki I yaitu kota Banda Aceh. Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Bireuen, Aceh Tamiang, Kota Langsa dan Kota Lhokseumawe termasuk ke dalam hirarki II. Sedangkan delapan kabupaten dan kota lainnya seperti Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Barat daya, Kabupaten Gayo lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten

Aceh Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Serta Kota Sabang dan Subussalam digolongkan kedalam hirarki III. Pada umumnya, delapan kabupaten dan dua kota tersebut memiliki jumlah fasilitas pendidikan sekolah dasar (SD) yang cukup banyak dan bahkan melebihi jumlah penduduk usia sekolah namun ketersediaan fasilitas pendidikan sekolah menengah pertama dan menengah hanya sedikit sehingga hal ini memperkecil total bobot ketersediaan fasilitas pelayanan di masing- masing kabupaten

Angka melek huruf (*literacy rate*) penduduk usia diatas 15 tahun di Provinsi Aceh mencapai 96,30 % dan rata-rata penduduk hanya menempuh pendidikan selama 8,88 tahun (setingkat SMP). IPM Provinsi Aceh berada pada angka 71,29 dan termasuk dalam kategori menengah keatas. Jika di lihat berdasarkan nilai IPM dapat disimpulkan bahwa kondisi pendidikan di Aceh belum cukup baik dan masih berada dibawah posisi rata-rata nasional.

Pembiayaan Pendidikan di Provinsi Aceh

Uraian ini akan menggambarkan tentang bagaimana dinamika pembiayaan pendidikan dari dana APBD Provinsi Aceh. Dalam hal ini peneliti akan membandingkan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dengan total APBD Provinsi Aceh dari tahun 2007 hingga tahun 2011.

APBD Provinsi yang dialokasikan untuk sektor pendidikan dari kurun waktu 2007 hingga 2011 mengalami flukstuasi baik dari besaran mau prosentasenya terhadap total APBD. Tahun 2008 APBD untuk pendidikan melonjak sebanyak 268,23 % dari tahun 2007, dan meningkat lagi sebanyak 25,08 % pada 2009, namun pada tahun 2010 mengalami penurunan

sebanyak 26,72 %. Persentase APBD yang dialokasikan untuk pendidikan masih kurang dari 20 %.

Hasil penelitian juga menyajikan fakta bahwa rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Aceh sudah mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat yaitu diatas 20 % dari total APBD. Kabupaten Aceh utara merupakan kabupaten yang mengalokasikan APBD untuk sektor pendidikan paling besar yaitu dengan persentase 52,7 %. Diikuti Kota Banda Aceh dengan persentase 49,1% dan Kabupaten Aceh Selatan (45,6 %).

Perbandingan Alokasi anggaran untuk sektor pendidikan yang bervariasi menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang berbeda-beda. Selain itu juga menunjukkan perbedaan prioritas pembangunan. Kabupaten Aceh Utara merupakan kabupaten yang cukup mapan secara ekonomi dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Aceh. Menurut penulis besar/kecilnya alokasi anggaran juga dipengaruhi faktor-faktor regional di daerah tersebut seperti jumlah murid, jumlah sekolah dan kondisi sosial ekonomi di wilayah tersebut

Pemanfaatan APBD di Dinas Pendidikan Provinsi Aceh

Tahun 2010, Dinas Pendidikan Provinsi Aceh mendapatkan alokasi dana APBD sebesar Rp 823.317.686.930,00. Dalam pembagian anggaran, belanja modal mendapatkan alokasi terbesar, dapat dilihat dari alokasi dana di Dinas Pendidikan Provinsi yang mencapai Rp 450.500.458.686,00 atau mendapatkan proporsi 54,72 % dari total anggaran. Diikuti dengan alokasi untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp 271.376.522.415,00 dan alokasi untuk belanja pegawai sebesar Rp 101.440.707.829,00. Proporsi masing-masing berturut-turut sebesar 31,96 % dan 12,32 %.

Program pendidikan 9 tahun mendapatkan alokasi paling besar yaitu dengan proporsi 52,6 dari total anggaran untuk Dinas Pendidikan Aceh.

Salah satu rincian belanja yang merupakan bagian dari belanja program wajib belajar 9 tahun adalah pembangunan gedung sekolah dan penambahan ruang kelas sekolah. Untuk pembangunan gedung sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Aceh menganggarkan Rp 15.737.637.771,00 dan untuk penambahan ruang kelas sekolah Dinas Pendidikan menganggarkan dana sebanyak Rp.60.329.652.767,00 selain itu untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar di sekolah-sekolah Dinas Pendidikan juga menganggarkan dana untuk pengadaan alat-alat praktikum dan peraga, serta mobuler dimana total dana yang dianggarkan mencapai 40 miliar rupiah. Selain program-program yang bersifat fisik, dinas pendidikan Provinsi Aceh mempunyai program unggulan yang ditujukan untuk mengurangi angka putus sekolah di tingkat wajib belajar 9 tahun, yaitu penyediaan beasiswa transisi. Beasiswa transisi merupakan dana yang berasal dari APBD provinsi yang ditujukan bagi siswa miskin agar dapat melanjutkan sekolahnya hingga selesai wajib belajar 9 tahun. Dana yang disediakan untuk beasiswa transisi pada tahun 2010 sebanyak Rp 208.587.500.000,00 Tabel di bawah menjelaskan tentang pemanfaatan dana untuk pembangunan subsektor pendidikan (sekolah dasar dan menengah) di Dinas Pendidikan Aceh.

Rincian	SD dan SMP	SMA
Pembangunan Gedung Sekolah	15,737,637,771.00	21,699,025,340.00
Rehabilitasi Gedung dan prasarana sekolah	9,239,387,003.00	10,057,736,008.00
Penambahan ruang kelas sekolah	60,329,652,767.00	53,195,244,328.00
Pembangunan sarana dan prasarana	28,849,316,826.00	38,125,852,104.00
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	970,000,000.00	0.00
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	518,280,000.00	556,580,000.00
Beasiswa untuk siswa miskin	208,587,800,000.00	0.00
Total	324,232,074,367.00	123,634,437,780.00

Alokasi Bantuan Pembiayaan Pendidikan di Kabupaten/ kota.

Uraian di bahwa ini akan menjelaskan tentang pendistribusian dana bantuan pendidikan atau disebut dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS merupakan dana yang berasal dari APBD yang diberikan ke sekolah-sekolah untuk kegiatan operasional sekolah. Dana ini dikururkan sebagai upaya pemerintah untuk mensukseskan program wajib belajar 9 tahun. Dana BOS dikelola oleh pemerintah Provinsi dan disalurkan langsung ke sekolah-sekolah.

Berdasarkan hasil dapat diketahui bahwa kabupaten Aceh Utara merupakan kabupaten yang paling banyak menerima dana BOS. Posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Aceh Timur dan posisi ketiga oleh Kabupaten Bireuen. Besaran dana BOS yang diperoleh oleh ketiga ini dipengaruhi oleh banyaknya siswa dan sekolah di ketiga kabupaten tersebut. Hasil uji korelasi antara jumlah sekolah dengan besarnya dana BOS menunjukkan angka yang besar yaitu 0,910 artinya bahwa terdapat ikatan yang kuat antara kedua variable tersebut. Hasil yang lebih besar ditunjukkan oleh hubungan besaran dana BOS dan jumlah siswa, dimana angka korelasi mencapai 1. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin banyak jumlah sekolah dan jumlah siswa di kabupaten/kota maka semakin banyak

dana BOS yang diterima oleh kabupaten/ kota tersebut.

Hasil analisis besaran dana BOS yang diterima oleh kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa secara tidak langsung pendistribusian dana BOS ke kabupaten/ kota di Provinsi Aceh sudah cukup adil. Kabupaten/ kota yang menerima BOS terbanyak adalah kabupaten/kota yang jumlah penduduk miskinnya juga paling banyak yaitu Aceh Utara, Aceh Timur dan Bireuen. Hal ini dapat ditunjukkan oleh tabel di bawah yang merupakan matriks hubungan antara penduduk miskin dan pendistribusian BOS ke tingkat sekolah.

Klasifikasi BOS Klasifikasi Kesejahteraan pddk	Klas I	Klas II	Klas III
Klas I	Aceh Timur Aceh Pidie Bireuen Aceh Utara	Aceh Besar	
Klas II	Aceh Tamiang	Aceh Selatan Aceh Tenggara Aceh Tengah Aceh Barat Nagan Raya Bener Meriah	Aceh Barat Daya Pidie Jaya
Klas III		Aceh Singkil Banda Aceh Langsa Lhokseumawe	Simeulue Gayo Lues Aceh Jaya Sabang Subussalam

Kesimpulan

1. Dinamika pembiayaan sektor pendidikan dari dana APBD Provinsi Aceh menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan yang diiringi dengan kenaikan dan penurunan APBD Provinsi. Jumlah APBD Provinsi yang dialokasikan untuk sektor pendidikan di Provinsi Aceh selama kurun waktu tahun 2007 hingga tahun 2011 mengalami fluktuasi baik secara besaran maupun prosentase dari total APBD.
2. Pemanfaatan pembiayaan pendidikan di Provinsi Aceh difokuskan untuk peningkatan pendidikan 9 tahun (SD dan SMP), ditunjukkan dengan pengalokasian dana sebesar 52,06 persen dari total anggaran yang diterima oleh Dinas Pendidikan. Sebagian besar dana yang dialokasikan tersebut digunakan untuk belanja barang/jasa dan belanja modal pembangunan pendidikan.
3. Dinamika pembiayaan sektor pendidikan dari dana APBD kabupaten/kota menunjukkan adanya perbedaan dalam besaran dan persentase terhadap total APBD masing-masing kabupaten. Secara umum, pengalokasian dana APBD untuk sektor pendidikan di daerah sudah cukup baik. Pengalokasian dana bantuan operasional sekolah di Provinsi Aceh sudah cukup adil, dimana dalam pegalokasiannya pemerintah daerah telah memperhatikan faktor-faktor sosial ekonomi seperti

jumlah sekolah dan jumlah murid menurut jenjang pendidikannya serta jumlah penduduk miskin secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap penerimaan bantuan operasional sekolah (BOS).

DAFTAR PUSTAKA

Muta'ali, Luthfi. 2008. *Metode dan Teknik I : Analisis Sosial dan Ekonomi*. Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.

Riyadi dan Bratakusuma D.,S,2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Rubenstein, J.M. 2003. *An introduction to Human Geography*. New Jersey : Pearson Education, Inc.

Sabari Yunus, Hadi. 2010. *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Santoso, Singgih. 2006. *Menguasai statistik di era informasi dengan SPSS 14*. Jakarta : PT Elex Media Computindo.

Soewartoyo; Handayani, Titiek; Sukarno, Makmuri. 2007. *Menuju Otonomi Sekolah: Konsep, Program dan Skenario*. Jakarta: LIPI Press

Tarigan, Robinson. 2006. *Perencanaan Pembangunan Wilayah : edisi kedua*. Jakarta : PT Bumi Aksara

Taufiq Ritonga, Irwan. 2009. *Perencanaan dan penganggaran keuangan daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Sekolah Pasca Sarjana UGM